



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti RPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Penyusunan Renja OPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dimana penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra OPD).

Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RKPD, Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai salah satu OPD di Kabupaten Batang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Batang. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja OPD yaitu upaya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kedepannya.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Terpetaknya kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang tahun 2024.
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Sub bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA OPD, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Sub bab ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD.

Sub bab ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2022 dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sub bab ini menguraikan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sub bab ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan, dan hambatan, dampak terhadap visi/ misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RPD

Sub bab ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

Bab III Tujuan, Sasaran, dan Program

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, dan program yang direncanakan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sub bab ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan tahun 2024

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sub bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disusun berdasarkan tugas dan fungsi.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana umum khususnya transportasi;
- b. Pemanfaatan dan penggalian potensi daerah bidang perhubungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang;
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi pembangunan;
- c. Tujuan yang akan dicapai;
- d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

e. Kebijakan–kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat daerah	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Penerangan bangunan kantor dinas	4 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	4 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40 paket	40 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	10 paket	100
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2.000 buah	2.490 buah	500 buah	500 buah	100	500 buah	500 buah	100
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik								
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya perawatan, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota	4 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ	4 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
		kabupaten/ kota								
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersediaanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota	4 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan perlengkapan jalan	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya pemeliharaan penerangan jalan umum	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya operasional pengelolaan Penerangan Jalan Umum	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan Terminal Tipe C	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana terminal	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terselenggaranya pengelolaan perparkiran	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Terlaksananya a pengelolaan perparkiran	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Kabupaten/ Kota									
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	20.000 set	20.000 set	5.000 set	5.000 set	100	5.000 set	5.000 set	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	52 unit	52 unit	13 unit	13 unit	100	13 unit	13 unit	100
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n- 1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
		analisis dampak lalu lintas								
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemantaun mudik , operasi laik jalan, dan pengamanan acara insidentil	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengkajian dan penetapan jaringan trayek pedesaan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen analisis jaringan trayek	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

▪ **Evaluasi Program Tahun 2022**

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dishub	Nilai SAKIP Dishub	65	72,95	112,23 %
2.	Meningkatnya layanan mobilitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi	Persentase layanan angkutan darat	7,5 %	7,16 %	95,47 %
3.	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transpotasi	Persentase penurunan angka kecelakaan	10 %	12,28 %	122,8 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2022 masuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian kinerja dari masing-masing indikator yang mencapai 95,47 % bahkan ada yang sampai 122,8 % dari target yang ditentukan. Capaian kinerja tersebut tentunya didukung dengan anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2022 sebesar Rp. 34.051.010.568,- (termasuk perubahan) dengan 3 program, 13 kegiatan, dan 31 sub kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 33.396.282.883,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 654.727.685,- atau dengan capaian persentase 98,1 %. Gambaran anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dan penyerapan anggaran sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

I. 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

I. 1. 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Anggaran : Rp. 4.236.065.671,-

Realisasi Anggaran : Rp. 4.002.523.855,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 1. 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Anggaran : Rp. 63.318.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 61.653.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

I. 2. 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran : Rp. 20.484.300,-

Realisasi Anggaran : Rp. 18.883.400,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 2. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran : Rp. 66.712.050,-

Realisasi Anggaran : Rp. 66.649.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 2. 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Anggaran : Rp. 33.750.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 33.450.000,-

Realisasi Fisik : 99,1 %

I. 2. 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran : Rp. 180.052.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 172.254.900,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 2. 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.500.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 4.248.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 2. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Anggaran : Rp. 83.983.667,-

Realisasi Anggaran : Rp. 83.368.408,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. 3. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 3. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran : Rp. 20.238.171.434,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.083.331.643,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 3. 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Anggaran : Rp. 694.898.261,-

Realisasi Anggaran : Rp. 653.749.713,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. 4. 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Anggaran : Rp. 319.785.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 313.885.151,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 1. 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 44.860.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

I. 4. 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Anggaran : Rp. 49.845.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 49.205.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

II. 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

II. 1. 1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 40.510.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 39.496.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

II. 2. 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 914.353.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 865.986.027,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 1. 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 300.136.290,-

Realisasi Anggaran : Rp. 296.857.788,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 2. 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah Anggaran : Rp. 2.708.242.335,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.704.330.889,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 2. 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan

Jumlah Anggaran : Rp. 327.515.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 324.868.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

II. 3. 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Jumlah Anggaran : Rp. 349.822.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 320.740.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

II. 4. 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan

Kabupaten/ Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 154.500.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 149.128.500,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

II. 5. 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Anggaran : Rp. 104.284.950,-

Realisasi Anggaran : Rp. 103.445.910,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 5. 2. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Anggaran : Rp. 259.338.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 259.001.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 4. 3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Anggaran : Rp. 125.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 125.000.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 4. 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor

Jumlah Anggaran : Rp. 149.335.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 143.389.200,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

II. 6. 1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan

Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu

Jumlah Anggaran : Rp. 1.755.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 1.719.508.508,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 6. 2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 371.465.710,-

Realisasi Anggaran : Rp. 348.394.791,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 6. 3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 25.742.600,-

Realisasi Anggaran : Rp. 16.817.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

II. 7. 1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 57.889.200,-

Realisasi Anggaran : Rp. 57.268.200,-

Realisasi Fisik : 100 %

II. 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

II. 8. 1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 314.212.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 284.874.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

III. Program Pengelolaan Pelayaran

III. 1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

III. 1. 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Anggaran : Rp. 45.650.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 44.115.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

▪ Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 29.337.160.572,- terurai dalam 2 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja bisa melebihi tahun 2022 atau minimal sama, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.
2. Pelaksanaan penyelesaian kegiatan fisik yang tidak tepat pada waktunya.
3. Keterbatasan anggaran Kabupaten Batang.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan urusan perhubungan tersebut, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 dan RPD 2023 - 2026 serta RPJPD 2005-2025, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

- a. Mengendalikan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
- b. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang atau pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- c. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Dalam hal ini dikhususkan kepada stakeholder angkutan darat dan pelajar sebagai pelopor keselamatan jalan.
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Perhubungan serta melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan Urusan Perhubungan.

II. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Adanya analisis dampak lalu lintas dari suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- b. Pelaksanaan digitalisasi keuangan dan transaksi non tunai dari setiap pembayaran dan penyetoran retribusi.
- c. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Dari tahun ke tahun pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan urusan perhubungan di Kabupaten Batang terus menerus mengalami

peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas semua jenis pelayanan di Dinas Perhubungan.
2. Tertibnya administrasi dilingkungan Dinas Perhubungan.
3. Meningkatnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Instansi Pemerintah lainnya maupun dengan pihak swasta.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pembelajaran mandiri;
2. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan yang mendukung tugas aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.
3. Penguatan koordinasi intern dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

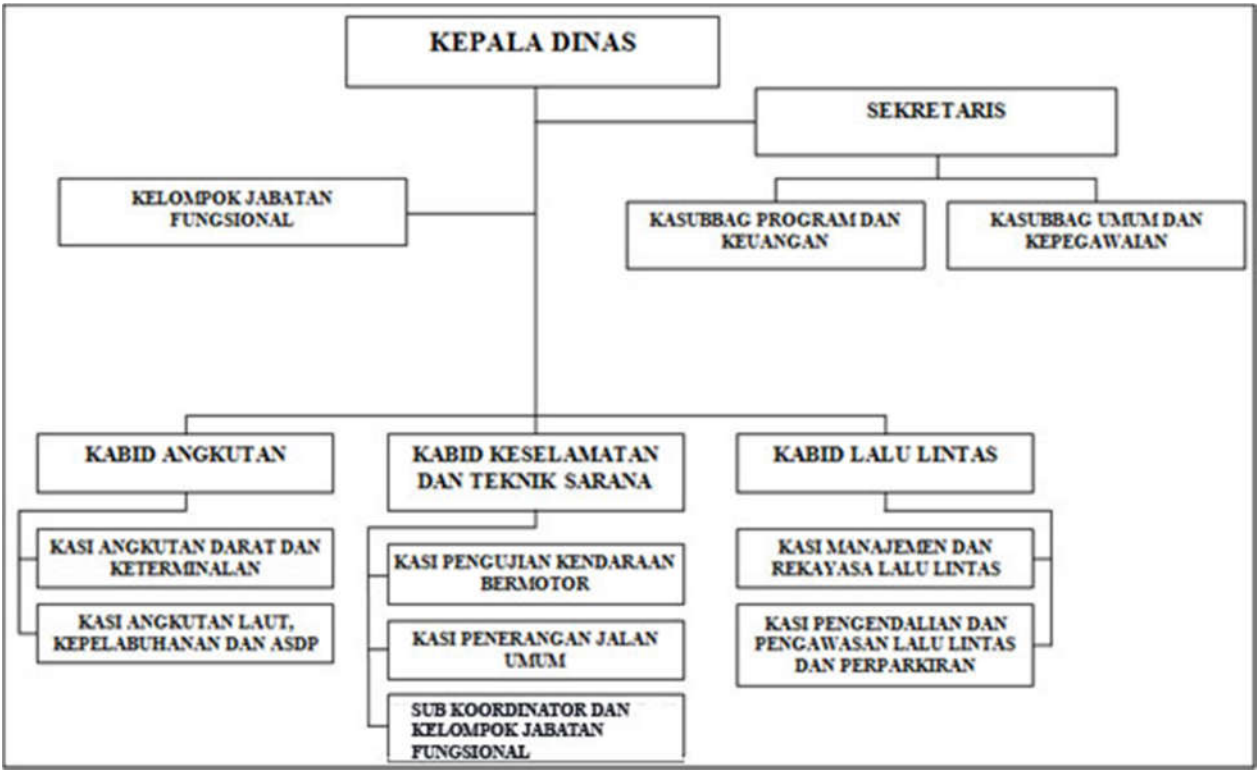
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Angkutan, terdiri atas:

1. Seksi Angkutan Darat dan Keturninalan; dan
2. Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3. Sub Koordinator Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.
- e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan struktur organisasi

Dinas perhubungan kabupaten batang

- Dinas Perhubungan Kabupaten Batang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;

- f. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- g. pengelolaan manajemen perparkiran;
- h. pengelolan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- j. pengendalian teknis di bidang perhubungan;
- k. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- l. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- n. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan urusan perhubungan. Berdasar hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang mencoba menginventarisir isu-isu penting yang berkembang dimasyarakat dengan tujuan tercapainya sasaran dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan urusan perhubungan.

Berikut ini isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- a. Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens dari potensi kemacetan dari kota/ kabupaten tetangga serta pusat keramaian.
- b. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.
- c. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.

- e. Peningkatan profesionalisme aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparaturnya) untuk membantu kelancaran pelayanan urusan perhubungan.
- f. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- g. Penataan perparkiran yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir tidak resmi.

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Batang 2023 mengacu pada RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 yaitu tahapan RPD ke I tahun 2023-2026 dimana pelaksanaan RPD I (2023-2026) akan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase capaian kinerja program Dishub	90 %			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase capaian kinerja program Dishub	90 %		
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 laporan	6.750.000		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 laporan	6.254.400	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	6.750.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	6.254.400	
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	5.193.527.812		Kegiatan Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	6.129.337.309	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	52 orang/ bulan	5.135.669.812		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	45 orang/ bulan	6.096.277.309	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 dokumen	57.858.000		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 dokumen	33.060.000	

	Tugas ASN		Administrasi				Tugas ASN		Administrasi			
	Kegiatan Administrasi Umum	Dinas Perhubungan	Terlaksananya administrasi perangkat daerah	12 bulan	19.897.871.010		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya administrasi perangkat daerah	12 bulan	411.672.363	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	20.272.700		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	19.702.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	67.681.500		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	66.476.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan bahan logistik	1 paket	29.250.000		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan bahan logistik	1 paket	29.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan	10 paket	185.017.000		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan	10 paket	200.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	700 buah	4.500.000		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	700 buah	4.200.000	
	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	72 dokumen	80.000.000		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	72 laporan	92.292.563	

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 unit	7.500.000		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 unit	7.500.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain tersedia	1 unit	7.500.000		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain tersedia	1 unit	7.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya a penyediaan jasa penunjang	12 bulan			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya a penyediaan jasa penunjang	12 bulan	22.902.666.400	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Materai	500 buah	5.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Materai	500 buah	5.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 dokumen	18.226.568.410		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 laporan	22.199.520.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	108 laporan	698.146.400		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	108 laporan	698.146.400	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Dinas Perhubungan	Terlaksananya a pemeliharaan	12 bulan	667.360.000		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Dinas Perhubungan	Terlaksananya a pemeliharaan	12 bulan	667.360.000	

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	an	barang milik daerah				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	an	barang milik daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	49 unit	568.615.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	49 unit	557.360.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah pemeliharaan peralatan	100 unit	35.000.000		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah pemeliharaan peralatan	100 unit	35.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	75.000.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	75.000.000	
	Kegiatan Penataan Organisasi	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan organisasi	1 kegiatan	25.000.000		Kegiatan Penataan Organisasi	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan organisasi	1 kegiatan	25.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	25.000.000		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	25.000.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Dinas Perhubungan	Persentase terselenggara nya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman,	100%	4.399.011.750	2.	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Dinas Perhubungan	Persentase terselenggara nya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman,	100%	4.399.011.750	

			dan selamat						dan selamat			
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000		Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Ruas Jalan yang telah terpasang perlengkapan jalan	100%	2.711.360.000		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Ruas Jalan yang telah terpasang perlengkapan jalan	100%	2.711.360.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengadaan Penerangan Jalan Umum di jalan kabupaten	1 paket	1.400.000.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengadaan Penerangan Jalan Umum di jalan kabupaten	1 paket	1.400.000.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Persentase Pos Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api yang terpelihara	100 %	1.690.000.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Persentase Pos Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api yang terpelihara	100 %	1.689.334.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di jalan kabupaten	1 paket	500.000.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di jalan kabupaten	1 paket	500.000.000	
	Sub Kegiatan	Dinas	Jumlah paket	1 paket	1.035.040.000		Sub Kegiatan	Dinas	Jumlah paket	1 paket	1.035.040.000	

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Perhubungan	pemeliharaan perlengkapan jalan				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Perhubungan	pemeliharaan perlengkapan jalan			
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengelolaan terminal Tipe C	1 paket	202.748.000		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengelolaan terminal Tipe C	1 paket	202.748.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengembangan sarana prasarana terminal	1 paket	202.748.000		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengembangan sarana prasarana terminal	1 paket	202.748.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Jumlah fasilitas parkir yang dikelola	220 titik	297.840.600		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Jumlah fasilitas parkir yang dikelola	220 titik	297.840.600	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah fasilitas parkir yang dikelola	220 titik	297.840.600		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah fasilitas parkir yang dikelola	220 titik	297.840.600	
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.000 kendaraan	527.681.600		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.000 kendaraan	527.681.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengadaan sarana dan	1 paket	49.204.950		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	Dinas Perhubungan	Jumlah paket pengadaan sarana dan	1 paket	48.648.600	

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

	Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	an	prasarana Pengujian Berkala Kendara-an Bermotor				Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	an	prasarana Pengujian Berkala Kendara-an Bermotor			
	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor wajib uji	8.000 kendaraan	257.338.000		Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor wajib uji	8.000 kendaraan	209.698.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	5.000 set	125.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	5.000 set	125.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipeliha-ra	14 unit	144.335.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhu bung-an	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipeliha-ra	14 unit	144.335.000	
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhu bung-an	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas	10 kegiatan	66.600.000		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhu bung-an	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas	10 kegiatan	66.600.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhu bung-an	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkroni-sasi dokumen andalalin	10 kegiatan	16.600.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhu bung-an	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkroni-sasi dokumen andalalin	10 kegiatan	16.600.000	

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM. 05 Batang 51261 Jawa Tengah

Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	12 dokumen	50.000.000		Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	12 dokumen	50.000.000	
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi LLAJ di jalan kabupaten	100%	227.406.000		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi LLAJ di jalan kabupaten	100%	227.406.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan pemantauan mudik dan pengamanan lalu lintas acara insidentil	50 kegiatan	227.406.000		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan pemantauan mudik dan pengamanan lalu lintas acara insidentil	50 kegiatan	227.406.000	
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen pengkajian dan penetapan jaringan trayek pedesaan	1 dokumen	107.228.850		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen pengkajian dan penetapan jaringan trayek pedesaan	1 dokumen	107.228.850	
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen jaringan trayek	1 dokumen	107.228.850		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen jaringan trayek	1 dokumen	107.228.850	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM

3. 1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

a. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan

meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :

- Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;
- Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;
- Peningkatan / pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
- Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;
- Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
- Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;

- Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;
- Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.

b. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
- Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;
- Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

(2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3. 2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan perhubungan dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perhubungan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan perhubungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai mana terlampir pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kelancaran dan keamanan lalu lintas	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	0,5	Meningkatkan penataan transportasi dan keselamatan lalu lintas	Rasio ijin trayek	0,00013	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	69,8	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	69,8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

4. 1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disusun berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - I. 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I. 1. a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD – Pagu Rp. 6.254.400,-
 - I. 2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - I. 2. a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN – Pagu Rp. 5.034.398.679,-
 - I. 2. b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN – Pagu Rp. 33.060.000,-
 - I. 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I. 3. a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor – Pagu Rp. 19.702.900,-
 - I. 3. b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor – Pagu Rp. 66.476.900,-
 - I. 3. c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor – Pagu Rp. 29.000.000,-
 - I. 3. d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan – Pagu Rp. 200.000.000,-
 - I. 3. e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan – Pagu Rp. 4.200.000,-
 - I. 3. f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD – Pagu Rp. 92.292.563,-
 - I. 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I. 4. a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat – Pagu Rp. 5.000.000,-

- I. 4. b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
– Pagu Rp. 22.199.520.000,-
- I. 4. c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor –
Pagu Rp. 698.146.400,-
- I. 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I. 5. a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan – Pagu Rp. 557.360.000,-
 - I. 5. b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya –
Pagu Rp. 35.000.000,-
 - I. 5. c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya – Pagu Rp. 75.000.000,-
- I. 6. Kegiatan Penataan Organisasi
 - I. 6. a. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi– Pagu Rp. 25.000.000,-
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 - II. 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - II. 1. a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota –
Pagu Rp. 1.400.000.000,-
 - II. 1. b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan – Pagu
Rp. 1.689.334.000,-
 - II. 1. c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan – Pagu
Rp. 1.035.040.000,-
 - II. 2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - II. 2. a. Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C –
Pagu Rp. 202.748.000,-
 - II. 3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - II. 3. a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/ Kota – Pagu Rp. 297.840.600,-

II. 4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

II. 4. a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor – Pagu Rp. 48.648.600,-

II. 4. b. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan

Bermotor – Pagu Rp. 209.698.000,-

II. 4. c. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor – Pagu Rp. 125.000.000,-

II. 4. d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor – Pagu Rp. 144.335.000,-

II. 5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota

II. 5. a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin - Pagu

Rp. 16.600.000,-

II. 5. b. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis

Andalalin – Pagu Rp. 50.000.000,-

II. 6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

II. 6. a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal – Pagu

Rp. 227.406.000,-

II. 7. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

II. 7. a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota – Pagu Rp. 107.228.850,-

Faktor yang mendasari perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diantaranya pemetaan analisa kebutuhan anggaran di Sekretariat, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024 terjadi ketidaksesuaian dengan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. 1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja)) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih oprasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan. Untuk itu dalam rangka menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggraan.
- b. Indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan hasil analisa dan perhitungan dari tiap-tiap Bidang, agar dalam pelaksanaannya tidak hanya fokus pada capaian indikator kinerja tetapi juga memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- c. Akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 agar tetap efektif dan efisien.

Dari Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang telah disusun diharapkan agar pelaksanaan Urusan Perhubungan dapat berdampak pada perbaikan pelayanan angkutan dan peningkatan kelancaran serta keselamatan jalan.

Batang, Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Batang,

DWI RIYANTO, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004